



Judul : Tidak boleh konsultasi dulu ke DPR
Tanggal : Senin, 02 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Tidak Boleh Konsultasi Dulu ke DPR

DENGAN terpilihnya Arsul Sani yang pernah duduk di Komisi III untuk menjabat hakim MK apakah tidak terlihat ada konflik kepentingan?

Ada tidaknya konflik kepentingan perlu dibuktikan lebih jauh. Namun, dengan terpilihnya Pak Arsul yang merupakan anggota DPR, lebih khusus Komisi III yang juga melakukan *fit and proper test* pada calon hakim MK yang diajukan DPR, tidak menaflkan dugaan publik bahwa konflik kepentingan potensial terjadi.

Apa kekhawatiran jika orang yang dekat dengan parlemen menjadi hakim MK?

Kekhawatiran jika ada konsensi tertentu saat pemilihan yang bersangkutan dengan DPR yang kemudian mengganggu implementasi fungsi sebagai hakim. Saya

berharap apa yang dikhawatirkan tidak terjadi karena kinerja MK, termasuk hakim akan diawasi publik.

Dalam uji kelayakan, salah seorang anggota Komisi III DPR sempat melayangkan pertanyaan yang mengisyaratkan 'hakim MK (perwakilan DPR) harus berkonsultasi ke DPR sebelum mengambil putusan'. Tidakkah itu menyandera independensi hakim MK?

Menurut saya, hakim MK tidak boleh berkonsultasi dengan DPR sebelum mengambil putusan. Hal itu tidak saja menyandera atas utama independensi dan imparisialitas dalam ranah kekuasaan yudikatif, juga mengganggu

prinsip *checks and balances* sebagai hal pokok dalam negara demokrasi konstitusional, termasuk Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa sikap independensi menjadi

tantangan untuk Arsul?

Tantangannya, yaitu ke-mauan dan kesungguhan untuk menjamin independensi dan imparisial dalam menjalankan fungsi sebagai hakim di MK. Meski diajukan DPR, ketika menjadi bagian dari MK, yang bersangkutan bukan lagi anggota DPR dan bahkan representasi partai politik.

Apa pesan untuk Pak Arsul?

Berharap Pak Arsul menjalankan tugas selayaknya hakim konstitusi yang ideal, yaitu independen, imparisial, profesional, serta berintegritas. (Rif/P-2)



Umbu Rauta

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga